

**PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU TANI DI WILAYAH KERJA BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**

***PROBLEMATICS IMPLEMENTATION OF FARMERS CARD PROGRAM
IN WORKING AREA THE AGRICULTURAL EXTENSION CENTER
IN BONANG DISTRICT DEMAK REGENCY***

Ahmad Abdurrahman Wahid^{1*}, Siwi Gayatri², Kadhung Prayoga³

^{*1,2,3}Program Studi Agribisnis, Departemen Pertanian, Fakultas Peternakan dan Pertanian,
Universitas Diponegoro, Semarang
kakaawahid@gmail.com,
gayatri.siw@gmail.com, kadhungprayoga@gmail.com

*Penulis korespondensi: kakaawahid@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the not yet optimal implementation of the policy of the farmer card program in the BPP work area of Bonang District, Demak Regency in an effort to achieve the policy goals. Implementation of the farmer card program in Demak Regency which was launched since 2017 apparently still found many problems that hampered the implementation of the program. The purpose of this study is to provide an analysis of the implementation and problems in the implementation of the farmer card program in the work area of the Agricultural Extension Center of Bonang District, Demak Regency. This research was conducted in January-March 2020 using an explanatory type and is a qualitative study. This research approach is a case study. The location is determined by purposive sampling. Determination of informants using the snowball sampling method to obtain 21 informants. Retrieval of data using in-depth interviews, observation, field notes and documentation. Analysis of the data used is an interactive model analysis of Miles and Huberman including data reduction, presentation and conclusion drawing. The results of this research are 1). The implementation of the farmer card program in the BPP working area of Bonang District, Demak Regency is in accordance with the farmer card SOPs made by policy makers, however technical and non-technical problems are present at every stage of the farmer program implementation. 2). Problems with implementing a farmer card program are influenced by communication, resource, disposition and bureaucratic structures that make complexity and continuity in the problem. Suggestions that can be given are optimizing and making mechanisms that are easier and can be applied by policy implementers and target groups.

Keywords: Implementation , Farmer Cards, Policy, Problems, Subsidized Fertilizers.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi kebijakan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Pelaksanaan program kartu tani di Kabupaten Demak yang di *launching* sejak 2017 ternyata masih banyak ditemukan masalah yang menghambat dalam pelaksanaan program tersebut. Tujuan penelitian ini untuk memberikan analisis pelaksanaan dan permasalahan dalam implementasi program kartu tani di wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Penelitian ini dilaksanakan pada Januari-Maret 2020 dengan menggunakan jenis eksplanatori dan merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini adalah studi kasus. Lokasi ditentukan dengan *purposive sampling*. Penentuan informan menggunakan metode *snowball sampling* sehingga didapatkan 21 informan. Pengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, catatan lapang dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah 1). Pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sudah sesuai dengan SOP kartu tani yang dibuat oleh pembuat kebijakan, walaupun demikian permasalahan teknis dan non teknis

terdapat pada setiap tahapan pelaksanaan program kartu tani. 2). Permasalahan implementasi program kartu tani dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang menjadikan kompleksitas dan kesinambungan dalam permasalahan. Saran yang dapat diberikan adalah mengoptimalkan dan membuat mekanisme yang lebih mudah dan secara aplikatif dapat dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran.

Kata kunci: Implementasi, Kartu Tani, Kebijakan, Problematika, Pupuk Subsidi.

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian merupakan suatu sektor pembangunan yang penting untuk diperhatikan. Pembangunan pertanian yang diproyeksikan untuk meningkatkan kesejahteraan petani tidak terlepas pada tujuan yang lainnya yaitu peningkatan produksi dan produktivitas petani. Salah satu dukungan pemerintah dalam penyediaan faktor *input* usahatani adalah kemudahan akses penebusan subsidi pupuk bagi petani. Kesejahteraan petani tidak lepas dari 3 hal yaitu permasalahan pupuk, benih dan harga (Dahiri, 2018). Kecukupan pupuk bagi tanaman akan merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang baik sehingga produksi dan produktivitas dapat meningkat. Kebijakan penyediaan pupuk bagi petani melalui kebijakan subsidi merupakan kebijakan pertanian yang mengalami berbagai transisi konseptual. Secara bertahap kebijakan pupuk subsidi diarahkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam proses pendistribusiannya. Penggunaan teknologi dan perluasan mitra dalam kebijakan kartu tani diupayakan agar dapat mengatasi permasalahan kebijakan pupuk subsidi yang selama ini terjadi.

Pemerintah Jawa Tengah dalam meningkatkan pencapaian tujuan kebijakan pupuk subsidi yang sesuai dengan asas 6 tepat melakukan terobosan dengan menggandeng pihak perbankan. Asas 6 tepat yang dimaksud adalah tepat harga, tepat sasaran, tepat mutu, tepat tempat, tepat waktu, tepat jumlah. Konsep terobosan tersebut diharapkan dapat menjadikan suatu mekanisme penyaluran pupuk subsidi yang tidak hanya berfokus pada penyaluran pupuk subsidi tetapi juga mencakup pendataan petani dan akses perbankan bagi petani. Program kartu tani mulai digencarkan sejak pertama kalinya di *launching* pada tahun 2015 di Kabupaten Batang. Kartu tani sendiri merupakan sebuah kartu atm yang digunakan untuk penebusan pupuk subsidi dan beberapa transaksi perbankan. Kartu tani dimaksudkan agar data petani dan alokasi pupuk subsidi yang diterimanya dapat terbaca saat penggunaannya pada alat EDC. Alokasi yang diterima oleh petani disesuaikan dengan luasan lahan dan kebutuhan pupuk sesuai dosis anjuran dinas pertanian terkait.

Kebutuhan dan data petani terinput kedalam RDKK yang terintegrasi dengan dengan Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI). Berdasarkan perkembangannya, kartu tani semakin digencarkan untuk disosialisasikan dan dilaksanakan di kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah. Terlebih setelah keluarnya intruksi gubernur Jawa Tengah dan Peraturan Menteri Pertanian tentang penggunaan kartu tani sebagai alternatif media penebusan pupuk subsidi. Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang berupaya menyediakan kemudahan akses mendapatkan pupuk subsidi melalui pengoptimalan pelaksanaan program kartu tani. Berdasarkan keterangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak pada Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kartu Tani di Pendopo Kabupaten Demak menjelaskan bahwa sebanyak 96% petani di Demak sudah terdaftar dalam pengajuan kartu tani.

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak dalam mengupayakan tujuan program kartu tani tidak lepas dari kontribusi dari beberapa komponen baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Komponen-komponen tersebut meliputi penyuluh pertanian lapangan (PPL), KPL, BRI, dan kelompok tani. Pelaksanaan program kartu tani di tiap-tiap kecamatan pada kenyataannya masih terdapat permasalahan-permasalahan. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bonang merupakan salah satu BPP yang mendapatkan sosialisasi program kartu tani dan melaksanakan penggunaan kartu tani di wilayah kerjanya. Wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang memiliki potensi pertanian dan merupakan BPP dengan wilayah terbesar ke-2 di Kabupaten Demak setelah Kecamatan Wedung. Permasalahan pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang yang kemudian menjadikan BPP Kecamatan Bonang sebelum tahun 2019 merupakan BPP dengan posisi terendah dalam penyerapan pupuk subsidi menggunakan kartu tani di Kabupaten Demak. Hal tersebut menunjukkan adanya kompleksitas masalah implementasi program kartu tani walaupun pada perkembangannya BPP Kecamatan Bonang selalu berupaya dalam peningkatan penggunaan kartu tani oleh petani.

Berdasarkan kondisi tersebut maka perlu adanya penelitian yang secara komprehensif menganalisis upaya-upaya dalam pelaksanaan implementasi program kartu tani. Melalui penelitian ini akan didapatkan hasil analisis yang dapat memberikan gambaran pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang. Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Kurniawati & Kurniawan (2016), Moko *et al.* (2017) yang lebih membahas tentang persepsi petani sebagai kelompok sasaran. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mufidah & Prabawati (2018) tentang implementasi program penyaluran pupuk subsidi melalui kartu tani karena penelitian ini menggunakan komponen informan kepala desa yang sebelumnya tidak dibahas dalam penelitian lain. Penelitian ini menyorot pada variabel-variabel yang secara krusial berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Penelitian juga dilakukan agar dapat menjelaskan permasalahan dalam implementasi program kartu tani. Variabel permasalahan implementasi kebijakan dilihat dari beberapa variabel-variabel yang disuulkan dalam model implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang yang dilaksanakan pada Januari-Maret 2020. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan termasuk jenis penelitian eksplanatori karena diharapkan penelitian ini dapat mengungkap, menguraikan dan menjelaskan pemaknaan-pemaknaan dalam melihat fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks sehingga mampu mendeskripsikan secara rinci dan mendalam pada suatu konteks alami tentang kebenaran yang terjadi di lapangan studi (Nugrahani, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program kartu tani dan menganalisis permasalahan implementasi program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang. Metode penentuan lokasi secara *purposive* dipilih karena untuk memberikan gambaran secara khusus atas fenomena dalam pelaksanaan dan penggunaan kartu tani di wilayah objek penelitian.

Penentuan Informan

Penentuan sampel menggunakan metode *snowball sampling* yang dimaksudkan agar informan yang dipilih merupakan informan yang kompatibel dalam memberikan informasi terkait tema penelitian. Penentuan informan disesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan oleh penelitian ini. Informan yang dipilih adalah komponen yang dapat memberikan informasi, mempresentasikan fenomena, aktivitas individu dan kelompok, serta karakteristik dalam kemajemukan objek penelitian. Informan merupakan implementor yang secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang. Jumlah informan adalah 21 orang meliputi komponen koordinator penyuluh BPP Kecamatan Bonang, admin kartu tani, penyuluh, ketua kelompok tani, KPL, BRI dan kepala desa.

Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, catatan lapang, serta dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumberdata primer didapatkan dari proses wawancara mendalam, observasi, catatan lapang dan dokumentasi. Wawancara mendalam berlangsung melalui proses diskusi terarah diantara peneliti dan informan menyangkut masalah yang diteliti (Gunawan, 2016). Observasi dilakukan dengan tipe partisipan sebagai pengamat karena peneliti membatasi diri untuk tidak terlibat secara mendalam pada aktivitas sumber yang diamati. Sumberdata sekunder diperoleh dari dokumentasi yang berupa sumber-sumber literasi yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, buku, laporan, data statistik, arsip serta publikasi media yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Pada pembahasan problematika implementasi program kartu tani digunakan model implementasi George C. Edward (1980) yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Prosedur pengolahan data penelitian ini meliputi:

1. Mencatat dan mengklarifikasi data yang diperoleh.
2. Mengelompokkan data-data dalam suatu pengkodean data sesuai kriteria dan ketentuan yang telah peneliti buat sebelumnya.
3. Mereduksi data dan mengolah data dengan melihat keterkaitan antar sumber data, keterkaitan antar informasi komponen informan, keterkaitan fenomena-fenomena temuan dengan catatan atas fenomena yang lalu yang berkaitan dengan implementasi program kartu tani.
4. Mendeskripsikan hasil pengolahan data melalui narasi, pola serta bentuk penyajian lain secara keseluruhan dan sistematis.
5. Menarik kesimpulan atas analisis data yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Pertanian Kecamatan Bonang

Pembangunan pertanian di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang memiliki fokus pembangunan pada peningkatan kemampuan petani dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan usahatani. Hal tersebut diupayakan agar petani mampu meningkatkan produktivitasnya dan produksi sektor pertanian di Kecamatan Bonang. Wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang terdiri dari 18 desa dari 21 desa di Kecamatan Bonang. Tidak masuknya 3 desa tersebut dalam wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dikarenakan 3 desa tersebut memiliki fokus pengembangan pada perikanan dan kelautan sehingga diluar dari pembinaan penyuluh di BPP Kecamatan Bonang. Pola-pola penyuluhan yang berupaya peningkatan kesejahteraan petani, pengetahuan dan keterampilan serta kemandirian petani dalam menunjang pertanian yang berkelanjutan menjadi fokus pengembangan yang dilakukan oleh BPP Kecamatan Bonang.

Langkah untuk mencapai hal tersebut dilakukan dengan kebijakan-kebijakan peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik dengan kegiatan diklat, demplot ataupun kunjungan-kunjungan studi banding yang melibatkan petani. Pembangunan pertanian menunjukkan adanya usaha untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan pendapatan, produktivitas usaha petani dengan upaya penambahan jumlah modal dan skill, serta memberikan ruang campur tangan manusia dalam perkembangan hewan dan tumbuhan yang diusahakannya (Sudalmi, 2010). Komoditas yang banyak dibudidayakan oleh petani di wilayah Kecamatan Bonang adalah tanaman pangan khususnya padi. Hal tersebut menjadikan problematika dalam pembangunan pertanian di Kecamatan Bonang merupakan kompleksitas masalah tanaman pangan. Pembangunan tata ruang daerah disesuaikan dengan pengembangan daerah berbasis produktivitas daerah seperti hasil pertanian yang dapat dikembangkan menjadi kota sentra pertanian atau agropolitan (Rohadi, 2014).

Karakteristik Informan dan Kondisi Sosial Budaya

Informan dalam penelitian ini adalah penyuluh, ketua kelompok tani, KPL, BRI, dan kepala desa yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Komponen pelaksana program kartu tani tersebut memiliki kecenderungan yang berbeda dalam intepretasinya terhadap program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang. Penyuluh BPP Kecamatan Bonang sebagai pelaksana program kartu tani dapat terbagi menjadi beberapa komposisi yaitu koordinator penyuluh yang bertugas sebagai koordinator BPP Kecamatan Bonang, admin kartu tani, petugas verval (verifikasi dan validasi) pendistribusian pupuk subsidi serta penyuluh. Walaupun demikian, seluruh penyuluh dari semua komposisi yang ada memiliki tanggungjawab yang sama yaitu melakukan pendataan petani, memberikan pendampingan pengusulan kartu tani dan pembuatan RDKK dengan ketentuan setiap penyuluh membina 2 sampai 3 desa. Secara umum penyuluh memiliki karakteristik yang jujur, bertanggungjawab terhadap tugas dan perannya sebagai penyuluh, walaupun didapati fakta pelaksanaan penyuluhan belum maksimal. Penyuluh dalam

menjalankan perannya dibantu oleh ketua kelompok tani. Kelompok tani merupakan komponen utama dalam penyuluhan selain dari peran penyuluh pertanian (Yani *et al.*, 2010).

Ketua kelompok tani di wilayah Kecamatan Bonang secara umum memiliki karakteristik yang sama terlebih jika didalam satu wilayah binaan (wilbin). Ketua kelompok tani dipilih oleh anggota kelompok tani melalui musyawarah kelompok tani. Pemimpin yang dipilih berdasarkan psikologis, pengalaman, ilmu keterampilan, serta kesepakatan bersama dengan pengakuan yang penuh merupakan pemimpin dalam kelompok tani (Zainal, 2013). Kedinamisan kelompok tani serta kemampuan ketua kelompok tani dalam manajemen kelompok tani yang tidak maksimal menjadikan motivasi menjadi ketua kelompok tani kurang. Hal tersebut dipahami bahwa orientasi yang dibangun adalah menjadi ketua kelompok tani merupakan tanggungjawab sosial. Unsur-unsur yang berhubungan dengan dinamika kelompok secara psikologis yaitu tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi tugas, pembinaan dan pemeliharaan kelompok, kesatuan/kekompakan kelompok, suasana (atmosfir) kelompok, tekanan kelompok, dan efektivitas kelompok (Damanik, 2013). Faktor usia lanjut, tingkat pendidikan rendah, keterampilan dan penerimaan terhadap teknologi dan inovasi yang rendah serta iklim sosial dalam kelompok tani yang kurang aktif menjadikan kemandirian kelompok tani masih terjadi hambatan. Karakteristik kelompok tani memiliki kecenderungan belum siap menerima inovasi teknologi pertanian tetapi sudah memiliki ketertarikan untuk mengetahui inovasi tersebut dan ketua kelompok tani juga memiliki karakter tulus dalam membina kelompok taninya.

Kemandirian kelompok tani tidak terlepas dari peran kepala desa sebagai pimpinan dalam penentu kebijakan pertanian di desa (wilayah binaan). Kepala desa di Kecamatan Bonang memiliki kecenderungan memberikan akses pembangunan pertanian yang lebih terfokus pada pembangunan fisik misalnya pada JUT, normalisasi saluran irigasi, pembangunan talud dan sebagainya. Upaya-upaya dukungan pembangunan sumberdaya manusia pelaku usahatani belum optimal menjadi orientasi pembangunan pertanian di desa. Walaupun demikian kepala desa sebagai pimpinan kebijakan di desa memberikan ruang-ruang koordinasi melalui pembentukan gapoktan, dukungan peningkatan status badan hukum pada kelompok tani, mengadakan pertemuan poktan dan gapoktan pada awal tahun atau pada saat sebelum masuk musim tanam serta dukungan pada program-program pemerintah terkait sektor pertanian seperti verifikasi data RDKK pada kebijakan pendistribusian pupuk subsidi dan pelaksanaan program kartu tani. Kepala desa menjadi satu komponen tersendiri dalam program kartu tani walaupun perannya tidak dalam suatu lingkup yang teknis karena pada proses pendistribusian pupuk subsidi petani lebih berkoordinasi dengan pengecer atau KPL (Kios Pupuk Lengkap).

KPL merupakan komponen penting dalam program kartu tani dimana KPL berperan sebagai penyalur pupuk subsidi dan pelaksana penggesekan atau penggunaan kartu tani. Secara umum karakteristik KPL dalam mendistribusikan pupuk subsidi sama karena KPL terintegrasi dengan distributor yang sama. Karakteristik KPL secara umum memiliki kecenderungan mengikuti arahan dari distributor maupun pemerintah tetapi juga memiliki kepedulian terhadap petani yang membutuhkan pupuk tetapi terkendala dengan kemampuan finansial sehingga ada sistem hutang. Selain itu juga karena KPL memiliki hubungan satu sama lain yang terorganisir dalam suatu paguyuban KPL Kecamatan Bonang. Mekanisme kartu tani mengatur bahwa KPL juga merupakan agen BRILink karena dibekali alat EDC dari BRI. BRI sendiri yang mengurus kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang adalah KCP BRI unit Wedung dan KCP BRI Unit Demak Kota. Pegawai BRI sebagai unit pelayanan program kartu tani secara umum memiliki kecenderungan yang sama dalam melaksanakan perannya sebagai implementor yang sebatas mengikuti tugas atau intruksi dari pimpinan atau pihak BRI di atasnya.

Kondisi sosial budaya di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang sebenarnya memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan program kartu tani karena potensi pertanian yang besar, karakteristik petani yang hampir sama dan masih adanya keluhan distribusi pupuk subsidi. Kartu tani dapat diberikan sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Apalagi adanya permentan, intruksi Gubernur Jawa Tengah serta arahan dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak sebenarnya bisa menjadi pendorong akses penggunaan kartu tani. Tetapi, fakta lapangan menjelaskan bahwa petani belum siap untuk menggunakan kartu tani sebagai media pennebusan pupuk subsidi walaupun petani sudah terdata dalam pengusulan kartu tani. Karakteristik informan dan kondisi sosial budaya akan mempengaruhi kemampuan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tanggungjawabnya dan pula mempengaruhi penerimaan dari kelompok sasaran yaitu petani.

Implementasi Program Kartu Tani di Wilayah Kerja BPP Kecamatan Bonang

Pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dilaksanakan berdasarkan arahan pelaksana di tingkat atasnya yaitu Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak. Kabupaten Demak sendiri melakukan *launching* kartu tani untuk pertama kalinya pada tahun 2017 dan semakin digencarkan ke lingkup yang lebih kecil melalui sosialisasi-sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi dilingkup BPP Kecamatan Bonang dimulai pada tahun 2017 yang bertempat di aula BPP Kecamatan Bonang dan dihadiri oleh komponen pelaksana kebijakan terkait. Pelaksanaan program kartu tani dilakukan pada beberapa tahap yaitu pengusulan kartu tani dan pembuatan RDKK, penerbitan kartu tani dan penggunaan kartu tani. Secara prinsip terdapat 2 bagian dalam pelaksanaan program kartu tani yaitu pemrosesan pencetakan Kartu Tani dan transaksi penebusan pupuk (Sriwinarti & Faesal, 2016).

Pengusulan kartu tani dan pembuatan RDKK secara teknis melibatkan penyuluh dan pengurus kelompok tani. Petani yang diusulkan diwajibkan untuk menyerahkan FC KTP dan FC SPPT. Kebutuhan pupuk yang tercantum pada RDKK yang akan dibuat adalah kebutuhan riil bagi lahan sesuai dosis anjuran. Sistem SIMPI (Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia) yang berdasarkan RDKK menjadikan distribusi pupuk terlaksana secara langsung kepada petani yang memiliki luasan lahan maksimal 2 ha (Kurniawati & Kurniawan, 2016). Fakta dilapangan menjelaskan bahwa terdapat dukungan dan hambatan dari sasaran program yaitu petani. Keterbatasan sumberdaya manusia terampil dalam kelompok tani menjadikan pembuatan RDKK dibina oleh penyuluh secara penuh. Ketua kelompok tani hanya bertugas pada pengumpulan syarat pengusulan kartu tani. Pengumpulan syarat pengusulan kartu tani dikumpulkan oleh petani kepada ketua kelompok tani atau dikumpulkan melalui perangkat desa. Selain pengumpulan syarat pengusulan kartu tani, ketua kelompok tani juga membuat *form* pendataan petani dengan membuat formulir secara tulis tangan atau menggunakan formulir yang sudah dipersiapkan oleh penyuluh.

Kesulitan pada saat pendataan adalah sinkronisasi berkas yang diusulkan dengan data formulir yang dibuat seperti perbedaan penyebutan nama, perbedaan nama pemilik lahan yang tertera di SPPT dengan yang tertera di KTP, banyaknya petani yang menggunakan sistem sewa sehingga pengumpulan berkas pengusulan kartu tani tidak sesuai dengan *timeline* yang disepakati dengan penyuluh. RDKK memuat data-data petani dan usahatani yang dijalankan. Secara umum RDKK memuat nama petani penerima pupuk bersubsidi, luasan lahan garapan, jadwal tanam, serta jumlah pupuk yang didapatkan sesuai dengan dosis yang dianjurkan instansi terkait (Rangkuti, 2012). Proses pembuatan RDKK oleh penyuluh kemudian di verifikasi oleh kepala desa dan selanjutnya secara kolektif akan menjadi RDKK tingkat kecamatan yang diverifikasi oleh koordinator BPP Kecamatan Bonang. Proses selanjutnya adalah penguploadan RDKK kedalam sistem SIMPI. Aplikasi SIMPI memiliki keunggulan yaitu sistem *single entry* data, proses validasi yang berjenjang dan melalui internet atau daring bersifat transparan dan multifungsi dalam penggunaannya (Kurniawati & Kurniawan, 2016). Walaupun dilakukan dengan sistem daring tetapi proses berjenjang untuk tingkat yang lebih atas juga dilakukan baik tingkat kabupaten dan provinsi.

Proses selanjutnya setelah adanya pengusulan kartu tani adalah penerbitan kartu tani. Penerbitan kartu tani di wilayah kerja BPP kecamatan Bonang di layani oleh dua kantor cabang pembantu (KCP) yaitu KCP BRI unit Wedung dan KCP BRI unit Demak Kota. Hal tersebut dilakukan karena tidak adanya KCP BRI di Kecamatan Bonang sehingga dialihkan kepada KCP BRI di kecamatan terdekat. Penerbitan kartu tani dilakukan melalui 2 proses yaitu pencetakan kartu tani dan pendistribusian kartu tani. Pencetakan kartu tani dilaksanakan dalam dua periode pencetakan yaitu periode pertama yang dilaksanakan pada tahun 2018 dan periode kedua pada tahun 2019. Pada periode pertama kartu tani yang tercetak merupakan kartu tani yang belum aktif sehingga perlu dilakukan aktivasi secara mandiri oleh petani. Pihak BRI melakukan aktivasi dengan memberikan pelayanan di kantor KCP BRI. Keterbatasan waktu, tempat, SDM serta alat menjadikan proses aktivasi kartu tani periode pertama masih terdapat masalah. Ketidaktahuan petani terkait proses aktivasi menjadikan petani pasif untuk melakukan proses aktivasi kartu tani.

Mekanisme pencetakan kartu tani periode kedua yaitu kartu tani yang tercetak secara otomatis teraktivasi. Aktivasi dilakukan oleh pihak BRI dengan memberikan nomer PIN standar. Harapannya kartu tani dapat langsung digunakan oleh petani sehingga perkembangan penebusan pupuk subsidi menggunakan kartu tani dapat terlihat progresnya. Walaupun demikian kartu tani yang tercetak pada periode kedua tidak langsung dibagikan kepada petani dan masih dipegang oleh penyuluh maupun ketua kelompok tani. Hal tersebut dilakukan karena belum tercetaknya kartu tani secara keseluruhan dan

rendahnya ketertarikan petani untuk menggunakan kartu tani sehingga dikhawatirkan kartu tani yang tercetak justru tidak difungsikan penggunaannya. Pendistribusian kartu tani pada periode pertama dilakukan dengan diberikan langsung kepada petani dan diharuskan melakukan proses aktivasi secara individu dengan membawa KTP dan KK. Petani dengan kondisi usia lanjut, akses mobilisasi untuk ke kantor BRI yang kurang, minat petani yang belum sepenuhnya menerima program kartu tani menjadikan motivasi petani dalam melakukan aktivasi kartu tani rendah. Mengatasi kendala tersebut maka kartu tani yang sudah tercetak diserahkan BRI kepada penyuluh yang membina petani yang bersangkutan.

Proses pendistribusian yang kurang terintegrasi antara penyuluh, kelompok tani, KCP BRI unit Wedung dan KCP BRI unit Demak Kota serta petani sebagai penerima kartu tani menjadikan masih adanya permasalahan terkait sinkronisasi data. Walaupun demikian, upaya-upaya koordinasi tetap dilakukan oleh seluruh pelaksana kebijakan program kartu tani. Setelah kartu tani diterbitkan maka selanjutnya adalah tahap penggunaan kartu tani. Pada tahun 2018 dilakukan uji coba penggunaan kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang oleh seluruh komponen pelaksana dan kelompok sasaran. Proses uji coba penggunaan kartu dilakukan dalam beberapa penyesuaian di tiap desa, sehingga ada perbedaan pelaksanaan uji coba kartu tani. Ada beberapa bentuk pelaksanaan uji coba kartu tani seperti:

- a. Kartu tani yang sudah teraktivasi tetapi belum terisi saldo tetap digunakan sebatas untuk melihat alokasi pupuk subsidi yang diterima oleh petani.
- b. Kartu tani tidak digunakan tetapi KPL melakukan penyaluran pupuk subsidi sesuai RDKK yang dipegang oleh KPL. Sehingga petani yang akan menebus pupuk subsidi terlebih dahulu mengecek namanya di RDKK yang dipegang oleh KPL.
- c. Kartu tani tidak digunakan, RDKK tetap disediakan tetapi tidak difungsikan untuk melihat data petani. Petani yang akan menebus pupuk subsidi harus menyertakan bukti surat atau bukti tertulis bahwa petani tersebut termasuk anggota kelompok tani yang dilayani oleh KPL. Bukti anggota kelompok tani dilakukan dengan petani meminta tanda tangan dan stempel kepada ketua kelompok tani sebelum menebus pupuk subsidi dan akan ditunjukkan kepada KPL saat melakukan penebusan.
- d. Kartu tani tidak digunakan, RDKK disediakan tetapi tidak difungsikan untuk melihat data petani. Petani yang akan melakukan penebusan pupuk subsidi harus menunjukkan SPPT lahan sawah kepada KPL sebagai bukti bahwa petani tersebut penggarap di wilayah setempat. Apabila nama yang tertera di SPPT lahan sawah berbeda dengan nama petani yang akan menebus pupuk subsidi maka harus meminta keterangan penjelas dari perangkat desa yang menyatakan bahwa lahan yang ada di SPPT merupakan lahan yang dimanfaatkan oleh petani yang akan menebus pupuk subsidi.

Problematika Implementasi Program Kartu Tani di Wilayah Kerja BPP Kecamatan Bonang

Problematika implementasi program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang memiliki kompleksitas permasalahan yang berdasarkan asa kausalitas menjadikan adanya sebab dan akibat dari sikap antar pelaksana kebijakan maupun dengan kelompok sasaran. Problematika implementasi pelaksanaan program kartu tani dijelaskan melalui suatu model implementasi yang menggambarkan saling keterkaitan antar variabel. Model implementasi kebijakan kartu tani dilihat berdasarkan variabel-variabel yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan publik dalam mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan model implementasi George C. Edward III (1980) yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dapat menjelaskan problematika implementasi program kartu tani di wilayah kerja BPP kecamatan Bonang.

A. Komunikasi

Pelaksanaan program kartu tani dapat optimal memberikan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan tujuan kebijakan apabila ukuran, tujuan, serta upaya mencapai tujuan tersebut dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan. Tujuan kebijakan perlu disampaikan kepada pelaksana kebijakan agar tidak adanya perbedaan orientasi dari setiap pelaksana dalam mencapai tujuan tersebut. Proses penyampaian tujuan kebijakan dilakukan melalui proses komunikasi yang optimal, tepat dan strategis. Proses komunikasi tersebut dilaksanakan dengan berbagai sosialisasi program kartu tani sehingga terjadi transfer informasi antara pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang diawali dengan proses sosialisasi yang melibatkan komponen-komponen pelaksana yaitu penyuluh, ketua kelompok tani, KPL, BRI dan turut mengundang pula kepala

desa. Komunikasi lebih lanjut dapat dijabarkan sebagai transmisi, kejelasan dan konsistensi (Yanto, 2016). Secara lebih praktis, permasalahan pelaksanaan komunikasi program kartu tani dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Transmisi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses sosialisasi program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang belum optimal. Masih didapatkan kondisi pelaksana maupun kelompok sasaran yang belum memahami program kartu tani secara jelas. Proses transmisi kebijakan kartu tani masih bersifat normatif dan belum esensial. Kegiatan sosialisasi kartu tani cenderung hanya diposisikan sebagai bahan sampingan dalam acara-acara eventual seperti pertemuan poktan atau gapoktan, pertemuan tahunan dan lain sebagainya. Penyelesaian permasalahan dalam proses transmisi tersebut diupayakan dengan melakukan beberapa cara misalnya koordinasi antara pembuat, pelaksana serta pemangku kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung dan memberikan dorongan agar kelompok sasaran memahami tujuan program kartu tani. Komunikasi yang ditransmisikan kepada kelompok sasaran akan mengurangi perbedaan-perbedaan implementasi yang dilakukan implementor (Subarsono, 2011).

2. Kejelasan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kejelasan informasi sebagai acuan atau pegangan pelaksanaan tugas pelaksana kebijakan komunikasi dalam sosialisasi kartu tani belum optimal. Penggunaan media sosialisasi tidak variatif dan lebih memilih dengan penggunaan metode ceramah dengan media *powerpoint* atau *printout* materi *powerpoint*. Ketua kelompok tani yang memiliki usia lanjut cenderung tidak maksimal dalam penyerapan informasi saat sosialisasi kartu tani. Adanya ketidakjelasan dalam komunikasi dan perbedaan tingkat pengetahuan akan menimbulkan perbedaan interpretasi antar pelaku kebijakan maupun kelompok sasaran. Penyuluh dalam meningkatkan kejelasan komunikasi maka dilakukan kunjungan-kunjungan lapangan. Perbedaan interpretasi terhadap program kartu tani tidak secara signifikan menghalangi implementasi karena adanya *group* sosial media sebagai wadah koordinasi antar pelaksana kebijakan. Tetapi, ketidakjelasan dalam sosialisasi tersebut menjadikan kurangnya pengetahuan petani sebagai kelompok sasaran dalam memahami berbagai manfaat kartu tani yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

3. Konsistensi

Konsistensi merupakan suatu hal dalam komunikasi yang patut untuk diperhatikan. Semakin konsisten suatu komunikasi diberikan kepada pelaksana dan kelompok sasaran maka semakin cepat pengambilan langkah strategis dalam pencapaian tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sosialisasi kartu tani secara massal hanya dilakukan secara intensif pada tahun pertama pasca *launching* program kartu tani di wilayah Kabupaten Demak. Penyuluh sebagai tangan panjang pemerintah memandang kurangnya komunikasi atau sosialisasi terkait program kartu tani. Upaya peningkatan intensitas sosialisasi dilakukan dengan kunjungan lapangan ke kelompok tani atau ke desa-desa. Tetapi pada pelaksanaannya tidak semua desa mendapatkan kunjungan sosialisasi kartu tani dan tidak semua kelompok tani aktif dalam melakukan pertemuan kelompok tani.

Secara umum pelaksanaan program kartu tani dapat berjalan dalam pengusulan dan pembuatan RDKK tetapi belum optimal dalam penggunaan kartu tani. Hal demikian menurut petani karena adanya kesenjangan komunikasi atas program tersebut setelah tahun pertama program disampaikan. Adanya kesenjangan tersebut dalam pandangan petani maupun mitra seperti KPL dan pihak BRI yaitu bahwa kartu tani belum terdapat ketegasan dari pembuat kebijakan dalam komunikasi dan implementasi kebijakan. Penyuluh juga menyadari bahwa adanya kebijakan pelaksanaan yang berubah-ubah dalam pendistribusian pupuk subsidi berdampak pada persepsi pelaksana yang lain maupun persepsi kelompok sasaran terhadap program kartu tani.

B. Sumberdaya

Variabel selanjutnya dalam suatu implementasi kebijakan yang berperan penting adalah ketersediaan sumberdaya-sumberdaya penunjang. Ketersediaan sumberdaya penunjang menjadi suatu kebutuhan yang penting karena akan berpengaruh pada optimalisasi implementasi kebijakan tersebut. Sebagus apapun konseptual kebijakan dan kemampuan sumberdaya manusia tetapi jika tidak didukung ketersediaan sumberdaya penunjang maka implementasi tidak akan maksimal. Sumberdaya-sumberdaya penunjang akan memberikan dampak pada kemampuan dan motivasi pelaksana kebijakan maupun kepada kelompok sasaran untuk memberikan apresiasi positif terhadap program kartu tani. Berdasarkan hasil

penelitian di ketahui bahwa ketersediaan sumberdaya penunjang akan berbeda-beda tergantung kebutuhan komponen pelaksana kebijakan. Berikut adalah kondisi implementasi program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang dilihat dari variabel sumberdaya.

1. Sumberdaya Manusia

Jumlah penyuluh di Kecamatan Bonang adalah 8 penyuluh penyuluh lapangan dengan komposisi 6 penyuluh PNS dan 2 penyuluh THL-TBPP. Jumlah tersebut dianggap belum memenuhi jumlah ideal karena wilayah binaan yang berjumlah 18 desa menjadikan setiap penyuluh dapat mengampu 2 sampai 3 desa, kecuali koordinator penyuluh yang hanya 1 desa. Kurangnya sumberdaya manusia sebagai pelaksana kebijakan juga disampaikan oleh pegawai Bank BRI. Pihak KCP BRI unit Wedung misalnya dengan jumlah 20 pegawai sedangkan harus melayani petani untuk 2 kecamatan maka jumlah tersebut masih begitu kurang begitupun dengan KCP BRI unit Demak Kota. Sumberdaya manusia tidak hanya dilihat dari kuantitas tetapi juga kualitas sumberdaya tersebut. Ketua kelompok tani dan KPL memiliki kecenderungan kompetensi yang kurang dalam memanfaatkan teknologi EDC dan kartu tani. Keterangan yang sama juga disampaikan oleh kepala desa bahwa petani memiliki kompetensi penggunaan kartu tani yang rendah.

2. Sumberdaya Informasi

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyampaian informasi dilakukan secara berjenjang *top-down*. Sumber informasi didapatkan melalui jalur linier sehingga apabila satu jalur memiliki keterbatasan ketersediaan dan keterbukaan informasi maka akan berdampak pada pelaksana dibawahnya. Ketersediaan informasi terkait program kartu tani sebenarnya sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Tetapi pada tingkat kelompok tani terjadi kesenjangan informasi karena kurangnya ruang untuk penyampaian informasi dan ketersediaan informasi yang diberikan oleh tingkat diatasnya. Informasi HET pupuk subsidi disampaikan oleh KPL yang ditempelkan di kios pupuknya tetapi untuk keterangan alokasi pupuk yang didapatkan, petani tidak mengerti karena tidak memahami terkait RDKK yang ada. Informasi terkait program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang disampaikan melalui forum-forum koordinasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Sumberdaya Wewenang

Sumberdaya wewenang berkaitan dengan akses wewenang yang diberikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk mengupayakan tujuan kebijakan. Sumberdaya wewenang juga dibutuhkan dalam kondisi yang membutuhkan strategi dan kebijakan dalam waktu terbatas, sehingga pelaksana kebijakan dapat segera menentukan sikap dan kebijakan terkait penyelesaian masalah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sumberdaya wewenang yang diberikan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik. Pada sisi lain ada beberapa pola perilaku dimana pelaksana kebijakan belum memanfaatkan sumberdaya wewenang yang ada. Misalnya di tingkat KPL yang tidak memanfaatkan kewenangan penggunaan alat EDC untuk melakukan transaksi selain untuk penebusan pupuk subsidi.

4. Sumberdaya Finansial

Sumberdaya finansial akan mendorong adanya manajemen keuangan dalam perencanaan penganggaran dan laporan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Sumberdaya finansial atau ketersediaan anggaran akan berpengaruh terhadap disposisi pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa anggaran dalam pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang terbatas. Keterbatasan anggaran menjadikan sosialisasi secara massal baik yang dilaksanakan oleh BPP Kecamatan Bonang maupun sosialisasi kartu tani saat pertemuan kelompok tani tidak maksimal.

5. Sumberdaya Sarana Prasarana

Sumberdaya sarana prasarana atau sumberdaya fasilitas dapat diartikan yaitu segala piranti atau sumberdaya fisik yang dapat dimanfaatkan guna memudahkan pencapaian tujuan kebijakan. Piranti tersebut dapat berupa alat/mesin, bangunan fisik, alat mobilisasi, teknologi dan lain-lain. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa pada pelaksanaan sosialisasi kartu tani lokasi yang dipilih adalah ruang pertemuan BPP Kecamatan Bonang dan balai desa. Balai desa dipilih karena memiliki ruangan yang dapat menampung orang dengan jumlah banyak. Ketersediaan sarana untuk mobilitas maupun untuk efektifitas kerja dilakukan dengan penggunaan sepeda motor milik pribadi penyuluh dan ketersediaan komputer di kantor BPP Kecamatan Bonang walaupun tiap penyuluh punya laptop masing-masing. Pihak BRI menjelaskan bahwa kapasitas kantor BRI yang terbatas menjadikan penumpukan petani saat melakukan aktivasi. Selain itu juga kekurangan perlengkapan yang digunakan untuk aktivasi saat kunjungan lapangan menjadikan pelayanan aktivasi membutuhkan waktu yang lebih lama. KPL

menjelaskan bahwa dari 30 KPL yang tergabung dalam paguyuban KPL Kecamatan Bonang hanya 20 KPL yang menerima alat EDC dan itupun ada yang ditarik kembali oleh pihak BRI. Pada tingkat ketua kelompok tani menjelaskan bahwa kartu tani belum seluruhnya tercetak dan juga petani yang tidak memiliki kendaraan bermotor merasa kesulitan dalam melakukan proses aktivasi di kantor BRI.

C. Disposisi

Kecenderungan sikap atau karakteristik penerimaan pelaksana kebijakan akan berpengaruh dengan upaya-upaya mewujudkan tujuan kebijakan. Disposisi berkaitan dengan karakter baik dalam bentuk kejujuran maupun komitmen terhadap tanggungjawab. Hal tersebut yang akan mempengaruhi motivasi pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan. Sikap yang dibentuk oleh pelaksana kebijakan atau implementor dapat berupa sikap positif seperti bentuk dukungan atau sikap negatif seperti keapatisan terhadap program/kegiatan (Aneta, 2010). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian penyuluh secara normatif mendukung adanya program kartu tani tetapi disisi lain penyuluh juga merasakan adanya kompleksitas permasalahan di lapangan sehingga berharap adanya evaluasi sebagian atau evaluasi total terhadap program kartu tani. Penyuluh dalam melaksanakan tugasnya memandang program kartu tani adalah suatu program pemerintah yang harus dijalankan. Sama halnya dengan pihak BRI yang menjelaskan bahwa perannya ditingkat bawah menjadikan KCP BRI unit Wedung dan KCP BRI unit Demak Kota hanya menjalankan intruksi dari pimpinan atau tingkatan diatasnya.

Sikap yang ditunjukkan oleh pihak BRI dalam melaksanakan perannya dalam kartu tani tidak lepas dari sikap petani dan KPL yang enggan menggunakan kartu tani. Ketua kelompok tani sebagai perwakilan dari kelompok sasaran yang sekaligus pelaksana kebijakan memandang kartu tani meribetkan bagi petani. Hal tersebut dikarenakan sumberdaya petani dan KPL yang belum siap dengan mekanisme kartu tani. Petani yang dekat dengan sumber pemberi informasi dan aktif dalam kelompok tani akan cenderung mendukung tujuan program kartu tani. KPL sebagai mitra dalam pennebusan pupuk subsidi memberikan resistensi karena KPL merasa kesulitan. Posisi dilematis dirasakan oleh KPL karena KPL diharapkan oleh distributor dan pemerintah untuk mengikuti aturan penyaluran pupuk sesuai RDKK, jumlah pupuk terserap semua dan mengaplikasikan kartu tani. Fakta dilapangan berbeda dengan harapan pembuat kebijakan dimana petani tidak mengapresiasi positif bahkan cenderung menolak program karena sistem pennebusannya ribet serta merasa tidak memiliki kebebasan dalam pennebusan pupuk bersubsidi.

Motivasi pelaksana kebijakan dalam melaksanakan perannya juga dipengaruhi oleh apresiasi atau insentif yang diberikan pihak terkait terhadap kinerja pelaksana kebijakan. Sebagian kecil dari kepala desa yang memberikan insentif berupa anggaran pengembangan sumberdaya petani dan kelembagaan petani. Berkaitan dengan program kartu tani kepala desa tidak begitu memahami dengan program tersebut sehingga dorongan untuk pendataan petani diserahkan kepada ketua kelompok tani masing-masing. Apresiasi dalam program kartu tani juga diberikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak melalui kegiatan kartu tani *award*. Kegiatan kartu tani *award* hanya dilakukan sekali dan tidak adanya keberlanjutan yang berkesinambungan.

D. Struktur Birokrasi

Ada 2 hal yang menjadi penting dalam membahas struktur birokrasi yaitu mekanisme dan struktur birokrasi tersebut. karakteristik penting dalam struktur birokrasi adalah SOP dan fragmentasi organisasi (Ramdhani dan Ramdhani, 2017). Mekanisme berkaitan dengan SOP dan standar keberhasilan program sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan fragmentasi yang ada dalam birokrasi yang berpengaruh dengan pola koordinasi yang terbentuk. Pemahaman dan interpretasi yang berbeda-beda akan berpengaruh dengan standar keberhasilan yang dipahami oleh tiap komponen. Penyuluh BPP Kecamatan Bonang menjelaskan bahwa untuk mencapai standar keberhasilan 6 tepat sangat sulit dan masih banyak hambatan. Standar keberhasilan yang ditetapkan oleh penyuluh adalah terintegrasinya pendataan petani secara menyeluruh karena kartu tani dianggap sebagai bank data.

Standar keberhasilan kartu tani yang ditetapkan oleh seluruh komponen pelaksana program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang hampir sama yaitu ketika petani dapat mengaplikasikan kartu tani secara mandiri dan berkelanjutan. Hal yang lain yang menjadi perhatian penting dalam variabel struktur birokrasi adalah struktur birokrasi itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya pembagian kewenangan atau fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan kartu tani di wilayah kerja BPP kecamatan Bonang tidak menghambat secara signifikan terhadap implementasi

kebijakan karena pola koordinasi dilakukan dengan langsung dengan tatap muka saat kunjungan lapangan maupun koordinasi secara tidak langsung melalui *group* media sosial untuk koordinasi terkait masalah kartu tani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang problematika implementasi program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang telah dijelaskan dalam pembahasan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program kartu tani dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh pembuat kebijakan. Permasalahan teknis maupun non teknis terdapat disetiap tahapan mekanisme program kartu tani. Kompleksitas permasalahan dalam kartu tani tetap diupayakan untuk dicarikan penyelesaiannya oleh pelaksana kebijakan dan juga dengan peningkatan minat petani terhadap program.
2. Variabel-variabel problematika yang memperngaruhi pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP Kecamatan Bonang yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang memiliki keterkaitan dan saling berpengaruh.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program kartu tani di wilayah kerja BPP kecamatan Bonang perlu ditingkatkan efektifitas dan efisiensi dalam implementasi kebijakan. Pemberian opsi-opsi kemudahan dalam pelaksanaan program kartu tani
- b. Meningkatkan intensitas komunikasi melalui sosialisasi yang berkesinambungan. Menyediakan dan meningkatkan sumberdaya penunjang dalam pelaksanaan program kartu tani. Meningkatkan pengetahuan terhadap program kartu tani dan mengaktifkan kelompok tani dapat agar disposisi pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran dapat mendukung tujuan program kartu tani. Melakukan pola-pola koordinasi dengan mengefektifkan struktur birokrasi yang ada.
- c. Bagi pengembangan program kartu tani yang lebih baik maka dapat dilakukan penelitian untuk mengkaji program kartu tani. Penelitian dapat dilakukan dengan ruang lingkup wilayah yang lebih luas dengan menonjolkan pemaknaan pada setiap pembuat kebijakan, komponen pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, A. 2010. Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo. *Jurnal Administrasi Publik*. 1(1): 54–65.
- Dahiri. 2018. Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tanaman Pangan dan Pemberdayaan Desa Melalui Program Padat Karya Tunai di Desa (PKTD). *Buletin APBN*. 3(14): 3–8.
- Damanik, I. P. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dinamika Kelompok dan Hubungannya dengan Kelas Kemampuan Kelompok Tani di Desa Pulokencana Kabupaten Serang. *Jurnal Penyuluhan*, 9(1): 31–40. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v9i1.9856>
- Gunawan, I. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kurniawati, E., & Kurniawan, A. 2016. Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Kartu Tani di Kabupaten Pati (Kasus di Desa Wotan dan Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo). *Jurnal Bumi Indonesia*. 7 (4): 1-15. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Moko, K. W., Suwanto, & Utami, B. W. 2017. Persepsi Petani Terhadap Program Kartu Tani di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. *Jurnal Cakra Tani*. 32(1): 9–13. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.ejmech.2013.01.010>
- Mufidah, N., & Prabawati, I. 2018. Implementasi Program Penyaluran Pupuk Subsidi Melalui Kartu Tani di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal PUBLIKA*. 6(9): 1–8.
- Nugrahani, F. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo:Cakra

Books.

- Rangkuti, S. 2012. Efetifitas Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten Deli Serdang Studi Kasus Di Kecamatan Hamparan Perak. *Jurnal Administrasi Publik*. 3(2): 287–318.
- Rohadi, T. 2014. Mewujudkan Visi , Misi dan Program Aksi Pemerintahan Baru Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1(4): 10–20.
- Sriwinarti, N. K., & Faesal, A. 2016. Sistem Informasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Kecamatan Gerung Lombok Barat. *Jurnal Matrik*. 15(1): 1–5. <https://doi.org/10.30812/matrik.v15i1.30>
- Subarsono, A. 2011. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudalmi, E. R. 2010. Pembangunan pertanian berkelanjutan endang sri sudalmi. *Inovasi Pertanian*. 9(2): 15–28. <http://www.ejurnal.unisri.ac.id/index.php/innofarm/article/viewFile/28/2>
- Yani, D. E., Ludvica, E., & Noviyanti, R. 2010. Persepsi Anggota Terhadap Perak Kelompok Tani dalam Peningkatan Kemampuan Penguasaan Teknologi Budidaya Belimbing. *Jurnal Matematika, Sains, Dan Teknologi*. 11(2): 133–145.
- Yanto. 2016. *Implementasi kebijakan penyuluhan pada penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Badan Pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan (BP4K) Kabupaten Karawang*. Jurnal Implementasi Kebijakan Penyuluhan Pertanian. 11(2), 1–16.
- Zainal, V. R. 2013. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.